

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Jumlah Anggota TGUPP Dipangkas

Sempat Terjadi Perdebatan

JAKARTA - Ada tindak lanjut DPRD DKI Jakarta usai memangkas anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hal itu yakni, dengan merampingkan tim bentukan Gubernur Anies Baswedan dari 67 menjadi 50 orang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, dirinya telah mengetuk palu anggaran hanya untuk 50 anggota TGUPP.

Di tahun sebelumnya, anggaran diberikan untuk 67 anggota TGUPP. "Ya anggota TGUPP kita rampingkan," ungkapnya kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Mulanya, sambung politisi PDI Perjuangan itu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS sebesar Rp19,8 miliar untuk 67 anggota TGUPP. DPRD DKI Jakarta tak sepakat.

Sempat terjadi perdebatan. Hingga DPRD DKI Jakarta hanya sepakat TGUPP terdiri dari 50 anggota. Namun, saat palu anggaran diketuk, dirinya tidak menyebutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk 50 anggota TGUPP tersebut.

Keputusan ini diambil Prasetyo setelah mendengar penjelasan dari Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengenai kinerja TGUPP.

Menurut Saefullah, TGUPP banyak membantu Gubernur dalam merealisasikan visi dan misi sesuai dengan keahlian masing-masing.

TGUPP, lanjut dia, juga banyak menyelesaikan masalah dari berbagai aspek. Mereka bekerja untuk sama-sama menyelesaikan masalah ibu kota.

"Keberadaannya ada yang di kantor sebagai konseptor. Ada yang respons cepat atas pengaduan masyarakat di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, sosial, sebagai alat komunikasi," ungkapnya.

"Misalnya, sodetan Ciiliwung di Jatinegara itu ada yang ditugaskan mengkomunikasikan PUPR dan pemprov dan masyarakat. Mereka yang tiap hari ke sana lakukan komunikasi," tambah dia.

Ketua Fraksi I Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, tidak sepakat. Meski anggota TGUPP sudah dipotong hanya tinggal 50 dari 67, tetap tidak sepakat jika sebagian APBD DKI Jakarta 2020 dialokasikan untuk tim tersebut. "Tolong catatan Fraksi PDI Perjuangan tetap tolak anggaran TGUPP untuk 50 orang," tegas dia.

Seperti diketahui, TGUPP merupakan tim yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan untuk membantunya menjalankan tugas eksekutif di DKI Jakarta. Anggaran yang dialokasikan untuk mereka terus naik setiap tahun.

Pada 2017, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp890 juta untuk tim tersebut. Melonjak pada 2018, yakni mencapai Rp16,2 miliar. Pada 2019, anggaran yang diberikan kepada TGUPP mencapai Rp18,9 miliar.

Sebelumnya hal yang mengejutkan diungkapkan Komisi E DPRD DKI perihal adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (Komisaris) di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kondisi demikian tentunya menjadi perhatian serius kalangan politisi Kebon Sirih. Betapa tidak, anggota TGUPP dimaksud tentunya selama ini menerima penghasilan berlipat-lipat dari APBD DKI. (aen)